

**OPTIMALISASI DANA DESA DALAM  
MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEREKONOMIAN DESA**



**Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM**  
**Anggota DPR-RI Komisi XI**

# Target Pembangunan dan Tantangan Pemerintah Untuk Mewujudkannya

## NAWA CITA

- ❑ N3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- ❑ N5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- ❑ N7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik

## TARGET RPJM 2015-2019

- ❑ Tingkat kemiskinan turun dari kisaran 11% di tahun 2014 menjadi 5-6 % di 2019
- ❑ Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari kisaran 6% di tahun 2014 menjadi 4-5 % di tahun 2019
- ❑ Tingkat kesenjangan ekonomi (gini ratio) turun dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,37 pada tahun 2019
- ❑ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2014 sebesar 68,8, pada 2015 sebesar 69,5 dan target pada tahun 2019 sebesar 76,3.

## TARGET INKLUSI KEUANGAN

- ❑ Indeks inklusi keuangan naik dari 67,82% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2019

*Sumber: Kemenkeu*

# DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK)

## NAWA CITA 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan



1. Pengembangan Desa dan Kawasan pedesaan
2. Penguatan tata kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan kualitas pemerintah Daerah



Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

### Outcome :

Hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang adil dan Transparan

### Indikator Outcome :

- a. Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks williamson)
- b. Rasio PDRD terhadap PDRB
- c. Persentase Alokasi DAK Infrastruktur, sarana Prasarana Pelayanan Dasar dan Kedaulatan Pangan Terhadap Seluruh Aloksi DAK fisik
- d. Persentase Dana desa untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin besar terhadap total dana desa
- e. Persentase jumlah daerah yang mengikuti bimbingan teknis Keuangan Daereah dari seluruh Daerah yang Kinerja Pengelolaan Keuangannya masih rendah

### Kegiatan :

1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan Daerah
2. Monitpring dan penguatan pelaksanaan program penggunaan dana desa
3. Pengembangan dan transformasi sistem informasi keuangan daerah
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

## NAWA CITA 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik



Pengutan kapasitas fiskal Negara



# Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Penyaluran berbasis kinerja.



Total  
**761,1**  
(triliun Rupiah)



Transfer  
ke Daerah  
**701,1**

## Dana Bagi Hasil **87,7**

Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain sesuai UU Cukai, juga pembangunan sesuai prioritas daerah; DBH Dana Reboisasi (DR), selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan  
25% untuk belanja infrastruktur

## Dana Alokasi Khusus Fisik **62,4**

Mengejar keteringgalan infrastruktur layanan publik;  
Money follow program;  
Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi;  
Usulan daerah sesuai prioritas nasional.

## Dana Insentif Daerah **8,5**

Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat

## Dana Alokasi Umum **398,1**

Pagu bersifat dinamis;  
Bobot wilayah laut naik menjadi 100%;  
25% untuk belanja infrastruktur

## Dana Alokasi Khusus Nonfisik **123,5**

Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran :  
BOS untuk 211,6 sekolah;  
TPG 1,2 juta guru;  
BOK 9.767 Puskesmas.

## Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY **20,9**

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, sert pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh



Dana Desa  
**60,0**

**Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan dan keteringgalan geografis, melalui :**

- Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
- Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula
- Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin

ROAD MAP DANA DESA		2017	2018	2019
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>APBN-P 2015 Rp 20,8 T</b>	<b>APBN-P 2015 Rp 46,9 T</b>	<b>RP 60 T</b>	<b>RP 60 T</b>	<b>Target Rp 111,8 triliun.</b> Rata desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 miliar.
<b>Terbentuknya desa unggulan di setiap Kab/kota</b>				
Tersusunnya RKP Des dan APBDes Laporan Realisasi dan Penggunaan dana sesuai aturan	Minimal 10 % dari jumlah desa	Mininimal 20 % dari jumlah desa	Minimal 30% dari jumlah desa	Minimal 40 % dari jumlah desa

Sumber:

- [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)
- [ditjenpdt.kemendes.go.id](http://ditjenpdt.kemendes.go.id)

**Hati-hati kepala desanya  
ditangkap. Saya tidak  
menakut-nakuti**



---

**Presiden Joko Widodo** mewanti-wanti agar setiap Kepala Desa tidak menyelewengkan penggunaan dana desa. (*Sumber: TEMPO 9-15 Oktober 2017*)